

**A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI  A		<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit Pengolah Terkait
		<b>Kebijakan bidang Perdagangan</b>					
		1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan				Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
		2. Penyiapan bahan				Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
		3. Perumusan Kebijakan				Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
B.		4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5. Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		6. Perumusan dan Penetapan Standar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<b>Perdagangan Dalam Negeri</b>					
		1. Bina Usaha					
		a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		b. Bina Usaha Jasa Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		c. Bina Usaha Asing dan Agen Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Informasi Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran</li> <li>- Seksi analisa LKTP</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		e. Pelaku Pasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecer</li> <li>- Pemasok</li> </ul> 2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait
		a. Iklim usaha dan bimbingan teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Iklim usaha</li> <li>2) Bimbingan teknis</li> </ul>	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Fasilitasi usaha dan pemasaran</p> <p>1) Fasilitasi usaha produktif 2) Pemasaran</p> <p>c. Pengembangan produk lokal</p> <p>1) Penelaahan potensi produk 2) Fasilitasi penguatan produk</p> <p>d. Pencitraan produk dalam negeri</p> <p>1) Kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri 2) Peningkatan promosi</p> <p>3. Logistik dan Sarana Distribusi</p>	<p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p> <p>Biasa/ Terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>



NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Informasi Pasar</p> <p>1) Informasi harga pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis</p> <p>2) Informasi non harga pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis</p> <p>b. Informasi Hasil industri</p> <p>1) Gula dan tepung</p> <p>2) Minyak goreng dan garam</p>	<p>Rahasia</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C.		c. Barang strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Hasil agro 2) Hasil industri					
		d. Bahan pokok agro	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Serelia 2) Hewan dan non serelia					
		<b>Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					
		1. Standardisasi					
		a. Kelembagaan dan Informasi Standar	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Hubungan Kelembagaan 2) Informasi Standar					
		b. Kerjasama Standardisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Kerjasama Regional 2) Kerjasama Bilateral dan Multilateral  c. Perumusan dan Penerapan Standar  d. Tata Usaha  1) Keuangan 2) Kepegawaian 3) Perencanaan dan Program 4) Inventaris Kantor/BMAN 2. Pemberdayaan Konsumen  a. Kerjasama informasi dan Publikasi	Terbatas          Terbatas          Biasa/ Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum          Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum          Pengguna internal dan eksternal	Tertutup          Tertutup          Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.          Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.          Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait          Unit Pengolah Terkait          Unit Pengolah Terkait



NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen</p> <p>c. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha</p> <p>d. Fasilitasi kelembagaan</p> <p>1) Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 2) Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen 3. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>DPMPTSP Kab.Belitung Timur</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Produk pertambangan dan aneka industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		b. Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		c. Jasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Jasa Distribusi 2) Jasa Bisnis					
		d. Kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Metrologi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Sarana dan kerjasama</p> <p>1) Sarana metrologi legal 2) Kerjasama metrologi legal</p> <p>b. Kelembagaan dan penilaian</p> <p>1) Kelembagaan metrologi legal 2) Penilaian kelembagaan metrologi legal</p> <p>c. UTTP dan standar ukur</p> <p>1) Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu 2) Besaran arus, panjang dan volume</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
D.		d. Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 2) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan international					
		e. Balai pengelolaan standar nasional satuan ukur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Bimbingan mutu 2) Pelayanan teknis					
		<b>Perdagangan Berjangka Komoditi</b>					
		1. Perniagaan					
		a. Bina Usaha	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Kelembagaan dan pelaku penunjang 2) Pelaku pasar					



NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Pengembangan Pasar</p> <p>1) Kelembagaan dan produk 2) Tata tertib dan kontrak</p> <p>c. Sistem informasi</p> <p>1) Teknologi informasi 2) Data 3. Pasar Fisik dan Jasa</p> <p>a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p> <p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.		b. Pengawasan Pasar lelang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Pengawasan Transaksi 2) Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang					
		c. Pengawasan sistem resi gudang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<b>Bimbingan Teknis</b>	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
G.		<b>Evaluasi</b>	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
H.		<b>Laporan Statistik Perdagangan</b>	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester 2. Laporan Statistik Tahunan					